

POTENSI, EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2007

Oleh :
Saryadi¹⁾

This observational type is quantitative descriptive research with aim to know about description of terminal retribution potency at Bantul Regency in the year 2007, the efficiency and payment effectiveness, and contribution to the retribution total of the region and also Region Autonomic Income (PAD) at Bantul Regency on year 2007. Analysis instrument that used is simple mathematics formulation to calculate all of terminal retribution potency at Bantul Regency in the year 2007. To calculate the payment of efficiency value is utilized by comparison between cost that realized for terminal retribution income with realization of terminal retribution income then is multiplied by one hundred percent. To calculate the payment effectiveness value is utilized by comparison between realizations of terminal retribution income with the target of terminal retribution income which has been specified then is multiplied by one hundred percent. Therefore, to know about contribution value of terminal retribution to the retribution total of region is utilized by comparison between realizations of terminal retribution income with realization total of retribution income in region then is multiplied by one hundred percent. Then to know about contribution of terminal retribution to the Region Autonomic Income (PAD) is utilized comparison between realizations of terminal retribution income with realization of PAD income then is multiplied by one hundred percent.

Result of this research is known that terminal retribution potency at Bantul Regency on year 2007 relatively is low. The payment of terminal retribution was done considerably inefficient. Based on the acceptance target which has been specified, the payment of terminal retribution is called very effective. But if based on the available potency, the payment of terminal retribution is not effective. Then contribution of terminal retribution to the retribution total of region and also to PAD relatively is low.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu sumber retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul adalah penerimaan retribusi terminal. Sehingga

penerimaan retribusi terminal juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah maupun penerimaan daerah. Gambaran realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

1. Saryadi, S.IP., M.Si. adalah alumni Magister Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Tabel 1.1
Realisasi penerimaan retribusi daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2007

No.	Unsur Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan (dalam jutaan rupiah)
1.	Retribusi pelayanan kesehatan	22.132,24
2.	Retribusi pelayanan persampahan	133,59
3.	Retribusi penggantian bea cetak KTP dan akte capil	955,85
4.	Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan	13,02
5.	Retribusi pelayanan pasar	1.013,63
6.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	488,06
7.	Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	1.963,42
8.	Retribusi jasa usaha terminal	40,92
9.	Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir	6,45
10.	Retribusi jasa usaha penyedotan kakus	7,94
11.	Retribusi jasa usaha pemotongan hewan	56,67
12.	Retribusi jasa usaha tempat rekreasi&olahraga	1.657,15
13.	Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah	84,48
14.	Retribusi ijin mendirikan bangunan	971,46
15.	Retribusi ijin gangguan	468,99
16.	Retribusi ijin trayek	5,64
17.	Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah	637,97
18.	Retribusi tanda daftar perusahaan	101,51
19.	Retribusi ijin usaha jasa konstruksi	10,03
20.	Retribusi koperasi	1,44
21.	Retribusi ijin praktek tenaga medis	13,16
22.	Retribusi pemeriksaan kualitas air	10,93
23.	Retribusi ijin praktek tenaga keperawatan	13,30
24.	Retribusi sarana kesehatan	20,60
Jumlah		30.808,41

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007.

Dari tabel 1.1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa total realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 sebesar 30,8 milyar rupiah. Dari total penerimaan retribusi daerah tersebut, yang berasal dari retribusi terminal adalah sebesar 40,92 juta rupiah. Apabila dicermati

realisasi penerimaan dari setiap unsur penyumbang retribusi daerah tersebut, maka dibandingkan dengan unsur-unsur penyumbang retribusi daerah yang lain, retribusi terminal termasuk sebagai penyumbang yang jumlahnya relatif kecil.

Kondisi tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana potensi retribusi terminal, efisiensi dan efektivitas pemungutannya serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 tersebut. Mungkinkah realisasi yang kecil tersebut karena memang potensi yang ada juga hanya kecil ataukah karena pemungutannya yang tidak efisien dan tidak efektif.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 ?
2. Bagaimana efisiensi pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul tahun 2007 ?
3. Bagaimana efektivitas pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul tahun 2007 ?
4. Bagaimana kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah Kabupaten Bantul tahun 2007 ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi retribusi terminal di Kabupaten Bantul tahun 2007.
2. Untuk mengetahui efisiensi pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul tahun 2007.
3. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul tahun 2007.

4. Untuk mengetahui kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah Kabupaten Bantul tahun 2007.

4. Manfaat Penelitian

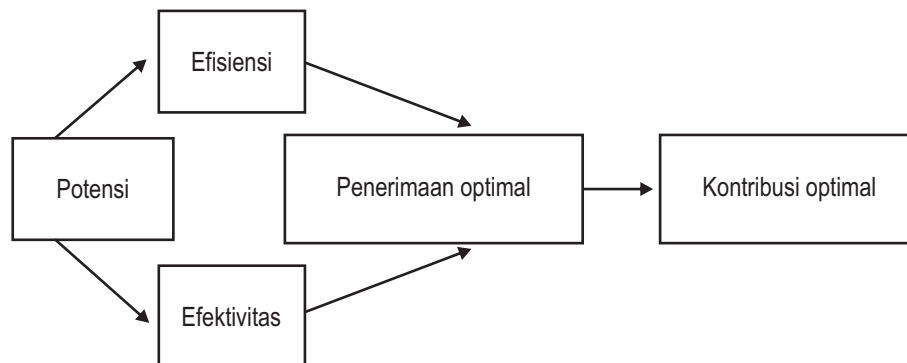
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan retribusi terminal.
2. Secara akademis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian serupa, khususnya tentang retribusi terminal.

5. Kerangka Pemikiran

Untuk melakukan optimalisasi penerimaan retribusi terminal, khususnya melalui upaya intensifikasi, terlebih dahulu perlu mengetahui potensi retribusi terminal yang ada di Kabupaten Bantul. Sehingga kebijakan penetapan target penerimaan retribusi benar-benar didasarkan pada perhitungan potensi yang ada.

Selanjutnya potensi yang ada dan telah diketahui tersebut harus dikelola secara efisien dan efektif. Efisiensi dalam pengelolaan potensi retribusi terminal berarti menekan seminimal mungkin biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan realisasi penerimaan retribusi terminal. Sedangkan efektivitas dalam pengelolaan potensi retribusi terminal



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

berarti mendorong seoptimal mungkin realisasi penerimaan retribusi terminal sehingga sesuai dengan potensi yang ada. Oleh karena itu apabila potensi retribusi terminal yang ada dan telah diketahui di Kabupaten Bantul dikelola secara efisien dan efektif, maka akan menghasilkan realisasi penerimaan retribusi terminal yang optimal. Kemudian dengan realisasi penerimaan retribusi terminal yang optimal, akan memberikan kontribusi terhadap total retribusi daerah maupun pendapatan asli daerah yang optimal juga.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

a. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antara lain terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - a. hasil pajak daerah ;
 - b. hasil retribusi daerah ;

- c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan ;
3. Pinjaman Daerah ;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari sejumlah pendapatan daerah tersebut diatas, upaya penghimpunan yang didorong untuk diutamakan adalah pada pendapatan asli daerah (PAD), mengingat PAD adalah sumber yang sering dijadikan ukuran kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995 : 20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu Pemerintah daerah. Dan salah satu sumber PAD yang dominan adalah retribusi daerah, dimana retribusi terminal merupakan salah satu jenis dari retribusi daerah.

b. Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sejalan dengan definisi tersebut, Munawir (1998 : 4) merumuskan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baliknya secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran ini.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu :

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain adalah retribusi terminal.
- c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu yang mana pemerintah daerah perlu mengatur pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan tersebut, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan peman-

faatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pungutan retribusi sangat tergantung oleh layanan jasa yang diberikan pemerintah daerah pada masyarakat pengguna layanan. Berbeda dengan pajak daerah, dilihat dari sudut lapangannya maka retribusi daerah masih terbuka lebar pengembangannya melalui peningkatan pelayanan, sepanjang jasa pelayanan yang diberikan betul-betul nyata.

c. Retribusi terminal

Retribusi terminal di Kabupaten Bantul diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal. Menurut pasal 2 Peraturan Daerah ini, setiap kendaraan angkutan umum yang memiliki trayek operasi di wilayah Kabupaten Bantul wajib memasuki terminal penumpang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pengenaan tarif retribusi terminal setiap kali kendaraan angkutan umum memasuki terminal didasarkan pada jenis kendaraan penumpang.

Terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul termasuk dalam terminal tipe B, yang melayani kendaraan angkutan umum jenis Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan angkutan pedesaan. Sesuai dengan pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, maka klasifikasi tarif retribusi terminal adalah sebagai berikut :

- a. AKDP ekonomi : Rp. 300,-
- b. Angkutan Pedesaan ekonomi : Rp. 250,-

d. Potensi, Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi

Mardiasmo dan Akhmad Makhfathih (2000 : 5) menguraikan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Kemudian diuraikan juga bahwa efektivitas yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut pajak atau retribusi dengan potensi pajak atau retribusi. Dan efisiensi diuraikan untuk mengukur bagian dari penerimaan pajak atau retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak atau retribusi yang bersangkutan.

Lebih lanjut Mahsun (2006 : 181 – 182) menjelaskan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan biaya produksi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya atau dana yang serendah-rendahnya. Kemudian efektivitas merupakan hubungan antara keluaran atau output dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila output atau hasilnya dapat tercapai sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Mardiasmo dan Akhmad Makhfathih (2000 : 17) untuk menghitung kontribusi retribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan analisis proporsi yaitu dengan membandingkan antara pencapaian atau realisasi penerimaan retribusi dengan pencapaian atau realisasi Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan dengan seratus persen.

2. Tinjauan Pustaka

Soedarmadji pada tahun 2000 melakukan penelitian yang menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar berdasarkan potensi di Kabupaten Sorong. Ia menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sorong, pemungutan retribusi pasar selama kurun waktu 1994/1995 sampai dengan 1998/1999 memiliki tingkat efisiensi yang cukup, yaitu dengan rata-rata pertahun sebesar 22,78 persen. Tingkat efektivitas pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sorong juga cukup baik, yang ditunjukkan oleh perbandingan hasil pungutan dengan potensi yang ada pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar 87,33 persen.

Kambu pada tahun 2000 juga mengadakan penelitian tentang potensi retribusi pasar di Kotamadya Jayapura. Dengan menggunakan potensi sebagai dasar perhitungan, nilai efektivitas rata-rata yang didapatkan sebesar 37,03 persen yang berarti pengelolaan retribusi pasar tidak efektif. Sedangkan dengan menggunakan target penerimaan sebagai dasar perhitungan, nilai efektivitasnya diatas 100 persen yang berarti sangat efektif.

Pada tahun 2000 Kartika melakukan penelitian tentang retribusi termi-

nal di Kabupaten Bulukumba. Kartika menyimpulkan bahwa pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bulukumba pada tahun 1999/2000 telah efektif sebagaimana diketahui dari perhitungan efektivitas yang tergolong efektif yaitu 82,16 persen. Selanjutnya pencapaian tingkat efisiensi antara 7 – 8 persen menunjukkan minimalnya pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk pemungutannya di Kabupaten Bulukumba.

Pada tahun 2001 Abubakar juga melakukan penelitian tentang potensi, efektivitas dan efisiensi pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Barru. Potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C tahun 2000 sebesar 482,82 juta rupiah. Abubakar menghasilkan kesimpulan bahwa efektivitas pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C tahun anggaran 2000 termasuk dalam kategori tidak efektif, di mana tingkat efektivitas pemungutannya sebesar 28,97 persen. Efisiensi pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C tahun anggaran 2000 termasuk dalam kategori yang tidak efisien, di mana tingkat efisiensi pemungutannya sebesar 88,30 persen.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan analisis secara kuantitatif dengan perhitungan matematika sederhana untuk menggambarkan atau mendes-

kripsikan bagaimana potensi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Bantul serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Dari Dinas Pendapatan Daerah diperoleh data target dan realisasi penerimaan daerah, target dan realisasi PAD, target dan realisasi penerimaan retribusi daerah, target dan realisasi penerimaan retribusi terminal. Selanjutnya dari Dinas Perhubungan diperoleh data tentang tarif pemungutan retribusi terminal, data tentang armada atau kendaraan angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul dan data tentang biaya-biaya pemungutan retribusi terminal.

3. Alat Analisis

a. Potensi Retribusi

Alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi terminal selama setahun dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan matematika sederhana sebagaimana formulasi yang dipergunakan dalam penelitian Kartika (2000 : 27) dengan rumus sebagai berikut :

$$PRT = KM \times r \times 365 \dots \dots \dots (3.1)$$

Di mana :

- PRT = Potensi retribusi terminal
- KM = Kendaraan yang masuk terminal perhari
- r = Tarif retribusi yang dikenakan

b. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan formulasi sebagaimana yang dipergunakan dalam penelitian Kartika (2000 : 28) dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan retribusi}}{\text{Penerimaan retribusi}} \times 100\% \dots (3.2)$$

Selanjutnya mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, maka tingkat efisiensi pemungutan retribusi terminal dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Efisiensi

No	Nilai Efisiensi	Kategori
1	Kurang dari 30 %	Sangat efisien
2	30 % - 45 %	Efisien
3	45 % - 60 %	Cukup efisien
4	60 % - 75 %	Tidak efisien
5	Lebih dari 75 %	Sangat tidak efisien

Sumber : Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

c. Efektivitas

Pengukuran efektivitas pada penelitian ini menggunakan rumus seperti yang digunakan dalam penelitian Kartika (2000:28) yaitu sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi}}{\text{Target penerimaan retribusi}} \times 100\% \dots (3.3)$$

Selanjutnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, maka tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kategori Efektivitas

No	Nilai Efektivitas	Kategori
1	Kurang dari 75 %	Sangat tidak efektif
2	75 % - 80 %	Tidak efektif
3	80 % - 85 %	Cukup efektif
4	85 % - 90 %	Efektif
5	Lebih dari 90 %	Sangat efektif

Sumber : Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

d. Kontribusi

Menurut Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih (2000 : 17) untuk menghitung kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan analisis proporsi yaitu dengan membandingkan antara pencapaian atau realisasi penerimaan retribusi terminal dengan pencapaian atau realisasi Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan dengan seratus persen atau dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$P = \frac{X_i}{X} \times 100\% \dots (3.4)$$

Keterangan :

P = Kontribusi

X_i = Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal

X = Total Realisasi Penerimaan PAD

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Potensi Retribusi Terminal

Sumber potensial penerimaan retribusi terminal adalah kendaraan angkutan umum yang beroperasi dan memiliki trayek di wilayah Kabupaten

Bantul. Sesuai dengan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, maka jumlah kendaraan angkutan umum di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 adalah sebagaimana tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Kendaraan Angkutan Umum
Di Kabupaten Bantul Tahun 2007

No	Jenis Kendaraan Angkutan Umum	Jumlah
1	Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	125
2	Angkutan Pedesaan	163

Sumber : Lampiran 1

Dari data pada tabel 4.1 selanjutnya dapat dilakukan penghitungan potensi retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 dengan menggunakan persamaan 3.1 yang telah disebutkan dalam alat analisis potensi retribusi terminal dengan hasil sebagaimana tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Potensi Retribusi Terminal
Di Kabupaten Bantul Tahun 2007

No	Jenis Kendaraan Angkutan Umum	Potensi Retribusi (dalam jutaan rupiah)
1	Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	41,06
2	Angkutan Pedesaan	44,62
Jumlah		85,68

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel 4.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa potensi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 adalah sebesar 85,68 juta rupiah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2007 hanya menetapkan target penerimaan retribusi terminal sebesar

37,46 juta rupiah atau setara dengan 43,72 persen dari potensi yang ada sebagaimana hasil penghitungan tersebut diatas.

Beberapa faktor yang kurang mendukung terwujudnya potensi tersebut menjadi realisasi penerimaan antara lain yang paling utama adalah kurangnya minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas angkutan umum karena semakin banyaknya masyarakat yang telah memiliki kendaraan sendiri, terutama sepeda motor. Disamping itu kualitas kendaraan dan pelayanan angkutan umum yang relatif rendah, misalnya armada kendaraan umum yang sudah tua. Faktor lainnya adalah bahwa wilayah Bantul maupun Daerah Istimewa Yogyakarta yang relatif tidak luas dan jarak tempuhnya masih terjangkau dengan kendaraan sendiri, membuat orang cenderung memilih menggunakan kendaraan sendiri daripada menggunakan angkutan umum.

2. Efisiensi Retribusi Terminal

Biaya operasional untuk merealisasikan penerimaan retribusi terminal terdiri dari biaya cetak karcis, biaya alat tulis kantor dan biaya pemeliharaan terminal. Biaya-biaya pemungutan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa total realisasi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 adalah sebesar 40,92 juta rupiah. Selanjutnya dapat dihitung nilai efisiensi pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007

Tabel 4.3
Biaya Pemungutan Retribusi Terminal
Di Kabupaten Bantul Tahun 2007

No	Uraian Biaya	Jumlah (dalam jutaan rupiah)
1	Gaji Petugas Pemungut (Pegawai Tidak Tetap)	24,04
2	Biaya cetak karcis 500 bendel x Rp. 2.000,-	1,00
3	Alat tulis kantor	1,50
4	Biaya pengecatan terminal	6,00
Jumlah		32,54

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2007.

dengan menggunakan persamaan 3.2 sebagaimana telah diuraikan pada alat analisis, sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 79,52 persen (Lampiran 7).

Dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan dalam BAB III, maka nilai efisiensi pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 sebesar 79,52 persen dapat dikatakan termasuk dalam kategori sangat tidak efisien.

Dengan mengacu kepada pasal 7 ayat (2) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, perhubungan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Termasuk dalam urusan perhubungan ini adalah pelayanan terminal penumpang untuk melayani masyarakat pengguna transportasi publik maupun melayani kendaraan angkutan umum. Selanjutnya atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah, pelayanan terminal merupakan salah satu obyek pemungutan retribusi jasa usaha. Sehingga pelayanan terminal disamping merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Bantul dibidang perhubungan, juga merupakan potensi pendapatan Daerah melalui pemungutan retribusi terminal, walaupun secara ekonomi pemungutan retribusi terminal ini sangat tidak efisien.

3. Efektivitas Retribusi Terminal

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul, total realisasi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 adalah sebesar 40,92 juta rupiah, sedangkan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebesar 37,46 juta rupiah. Selanjutnya dapat dihitung nilai efektivitas pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 dengan menggunakan persamaan 3.3 sebagaimana yang diuraikan pada alat analisis, sehingga menghasilkan nilai efektivitas sebesar 109,24 persen yang berarti sangat efektif (Lampiran 7).

Apabila memperhatikan data pada Lampiran 4, maka terlihat bahwa hampir seluruh jenis retribusi daerah realisasinya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun apabila memperhatikan tabel 4.2 tentang potensi retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 adalah sebesar 85,68 juta rupiah, maka terlihat bahwa target penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Bantul yang ditetapkan untuk tahun 2007 lebih rendah tidak sesuai dengan potensinya. Realisasi penerimaan retribusi terminal tersebut apabila dibandingkan dengan

potensinya, maka dengan menggunakan persamaan 3.3 pada alat analisis diatas, nilai efektivitasnya hanya sebesar 47,76 persen yang berarti sangat tidak efektif (Lampiran 7).

Perbedaan nilai efektivitas ini terjadi karena penetapan target penerimaan retribusi terminal yang tidak sesuai dengan potensinya. Dan kemungkinan besar penetapan target dari jenis retribusi daerah yang lain juga tidak sesuai dengan potensi dari masing-masing jenis retribusi tersebut.

4. Kontribusi Retribusi Terminal

Dari data di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul, dapat dihitung nilai kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah maupun terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 dengan menggunakan persamaan 3.4 pada alat analisis diatas, sehingga diperoleh nilai kontribusi sebagaimana tabel 4.4 .

Dari tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah adalah sebesar 0,13 persen. Sedangkan

kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,07 persen. Kontribusi tersebut, baik terhadap retribusi daerah apalagi terhadap pendapatan asli daerah adalah relatif kecil.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Potensi retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 adalah relatif rendah.
2. Pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 adalah sangat tidak efisien.
3. Pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 adalah sangat efektif.
4. Kontribusi retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 terhadap total retribusi daerah maupun terhadap pendapatan asli daerah adalah relatif kecil.

Tabel 4.4
Kontribusi Retribusi Terminal
Di Kabupaten Bantul Tahun 2007

No.	Terhadap Retribusi Daerah	Nilai	Terhadap PAD	Nilai
1	Realisasi (dalam jutaan rupiah)	40,92	Realisasi (dalam jutaan rupiah)	40,92
2	Realisasi Retribusi Daerah (dalam jutaan rupiah)	30.808,41	Realisasi PAD (dalam jutaan rupiah)	57.229,73
3	Kontribusi (%)	0,13	Kontribusi (%)	0,07

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bantul Tahun 2007 (diolah)

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, peneliti memberikan saran-saran, antara lain sebagai berikut :

1. Memperhatikan sisi geografis wilayah dan letak Kabupaten Bantul saat ini sulit untuk meningkatkan potensi retribusi terminal. Yang paling memungkinkan hanya meningkatkan target realisasi penerimaan agar sesuai dengan potensi yang telah ada.
2. Dari data biaya pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007, pengeluaran yang paling besar adalah gaji petugas pemungut yang merupakan pegawai tidak tetap. Dengan memperhatikan beban kerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, perlu dicermati kemungkinan petugas pemungut retribusi terminal tersebut dilakukan oleh PNS sendiri tanpa harus mengangkat pegawai tidak tetap.
3. Walaupun efektivitas pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 telah sangat efektif, namun efektivitas tersebut belum menggambarkan kondisi riil karena penetapan target yang harus dicapai masih berada dibawah potensi yang ada. Sehingga yang perlu mendapatkan penekanan perhatian adalah pada penetapan targetnya. Untuk dapat meningkatkan target penerimaan yang ditetapkan, maka ada faktor-faktor yang harus diperbaiki terlebih dahulu, antara lain :
 - a. Memberikan bimbingan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran pemilik maupun awak angkutan umum agar meningkatkan kualitas pelayanannya.
 - b. Memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menggunakan fasilitas angkutan umum.
 - c. Apabila memungkinkan perlu dirintis penyelenggaraan pelayanan angkutan umum terpadu dengan sistem dan kualitas yang lebih baik, seperti Trans Jogja atau busway di Jakarta.
 - d. Mengusulkan kepada Pemerintah Propinsi DIY agar mengenakan tarif progresif terhadap pajak kepemilikan kendaraan pribadi.
4. Dengan tetap mempertimbangkan aspek pelayanan publik, maka perlu dikaji kemungkinan penghapusan tarif retribusi terminal di Kabupaten Bantul, karena dari aspek keuangan daerah juga hanya kecil kontribusi yang akan hilang. Selanjutnya suatu saat apabila usaha angkutan umum sudah berkembang dan potensi retribusi terminal sudah cukup signifikan, dapat dikenakan kembali tarif retribusi terminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, 2001, " Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Barru ", *Tesis S-2 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Insukindro, Mardiasmo, Widayati. W, Jaya. W.K, Puwanto. B.M, Halim. A, Suprihanto. J, Purnomo. A.B., 1994, "Peran dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD", *Laporan Penelitian*. KKD, FE-UGM, Yogyakarta.
- Jones, Rowan and Pendlebury, Maurice, 1996, *Public Sector Accounting*, London, Pitsman Publishing.
- Kambu, Manase Robert, 2000, " Kajian Potensi dan Proyeksi Retribusi terminal serta kontribusinya Terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kotamadya Jayapura ", *Tesis S-2 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Kartika, Dwi Permatasari, 2000, " Analisis Potensi Retribusi Terminal di Kabupaten Bulukumba ", *Tesis S-2 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Mahsun, Mohamad, 2006, " *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* ", BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih, " Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang " , *Laporan Akhir Kerjasama, Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU Studi Ekonomi UGM*, 2000.
- Munawir, S, 1998, *Perpajakan*, Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal.
- Santoso, Bagus, 1995, " Retribusi terminal Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten Sleman, " *Prisma*, Nomor 4 , LP3ES 19-35.
- Sudarmadji, 2000, " Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Prospek Pungutan Retribusi terminal di Kabupaten Sorong ," *Tesis S-2 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada* , Yoyakarta (Tidak Dipublikasikan).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Widayat, Wahyu, 1994, " Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah ", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Edisi September 1994.